

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan telah menjadi masalah penting di bidang pembangunan yang bersifat multidimensional dan hingga kini masih menjadi tantangan utama bagi hampir seluruh negara di dunia (Faidiban *et al.*, 2025). Kondisi ini mencerminkan kondisi kesejahteraan yang rendah (*deprivation of well-being*) yang dicirikan oleh ketidakberdayaan individu maupun rumah tangga untuk mencukupi keperluan primer kehidupan secara memadai berdasarkan ambang batas minimum yang telah ditetapkan (Melliny *et al.*, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Todaro dan Smith memandang kemiskinan sebagai fenomena yang tidak hanya mencerminkan tingkat pendapatan yang rendah, terdapat juga pembatasan akses mengenai sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, serta hilangnya peluang hidup yang bermartabat (Rabani & Hutabarat, 2025). Dengan demikian, kemiskinan tidak semata-mata persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut dimensi sosial dan struktural yang lebih luas.

Sebagai upaya untuk mengukur dan membandingkan tingkat kemiskinan secara lintas negara, Bank Dunia (World Bank) menggunakan metode pengukuran yang seragam melalui pendekatan kesamaan daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP). Garis kemiskinan internasional untuk kategori yang sangat parah kini telah diperbarui, dari semula US\$1,90 menjadi US\$2,15 per kapita setiap harinya (PPP 2017). Penyesuaian ukuran yang berlaku menyeluruh ini tidak serta-merta menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan global, tetapi lebih kepada penyelarasan terhadap pergerakan harga nyata di pasar internasional. Melalui pembaruan ini, angka kemiskinan yang sangat parah tersebut dapat secara tepat

menggambarkan batas minimum kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup dasarnya di tengah dinamika ekonomi global (World Bank, 2022).

Di negara-negara berkembang, kondisi kemiskinan yang sangat parah tersebut cenderung bersifat berkepanjangan akibat berbagai tekanan struktural. World Bank (2022) mengidentifikasi bahwa kondisi ini dipicu oleh rendahnya kualitas modal manusia terutama fasilitas pendidikan dan Kesehatan yang berakibat langsung pada stagnasi produktivitas. Keterbatasan ini mempersempit akses masyarakat miskin terhadap lapangan kerja formal, sehingga memaksa sebagian besar angkatan kerja terserap dalam lapangan pekerjaan rentan (*vulnerable employment*) tanpa perlindungan sosial dan stabilitas upah. Tingginya proporsi pekerja berpenghasilan pas-pasan yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi inilah yang mengakibatkan proses pengentasan kemiskinan di negara berkembang berjalan sangat lambat (Yerrabati, 2022).

Sejalan dengan kondisi tersebut, kemiskinan di Indonesia juga dipahami sebagai persoalan multidimensional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan bahwa kemiskinan nasional tidak sekadar bermuara pada keterbatasan pendapatan, melainkan mencerminkan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar kesejahteraan, keterbatasan akses sosial ekonomi, serta minimnya partisipasi dalam penguasaan sumber daya pembangunan (Pratama & Rahadiana, 2023). Hal ini secara jelas mengindikasikan bahwa akar masalah kemiskinan di tingkat daerah sangat erat kaitannya dengan kerentanan struktural, di mana kelompok masyarakat bawah sering kali terabaikan dalam percepatan pembangunan nasional.

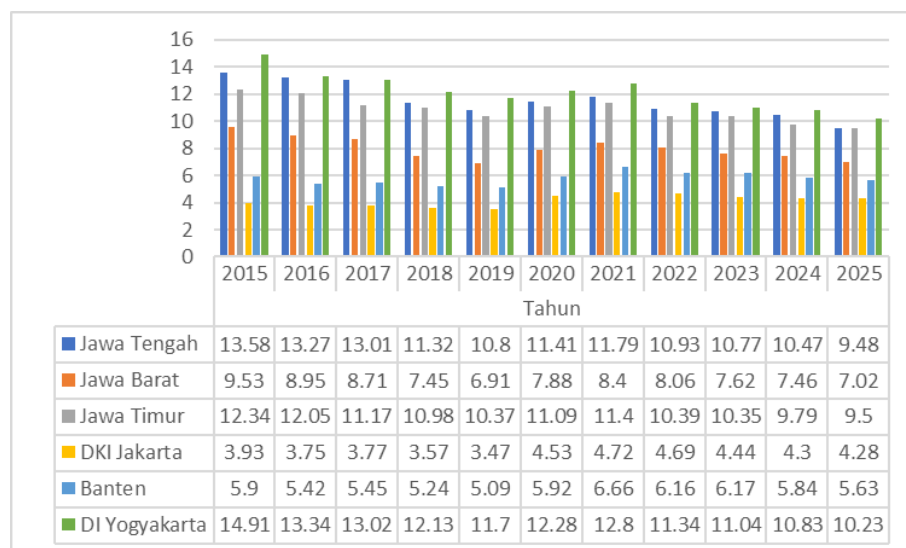
Berdasarkan amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia harus berfokus pada kesejahteraan

dan pemerataan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, pada pelaksanaan di tingkat daerah, upaya ini sering kali terhambat oleh masalah ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di berbagai daerah justru membuat masalah kemiskinan terus berlanjut (Liu *et al.*, 2023). Ketimpangan struktural inilah yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah tersebut, pembangunan daerah memerlukan langkah terpadu yang menghubungkan aspek dinamika kependudukan, makroekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Besarnya jumlah penduduk di suatu daerah dapat menjadi potensi penggerak ekonomi, namun juga dapat memicu peningkatan kemiskinan apabila kenaikan demografi tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian Wardana *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti dapat menurunkan tingkat kemiskinan, asalkan tingkat pengangguran dan tekanan kependudukan dapat dikendalikan. Oleh karena itu, keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola jumlah penduduk, memanfaatkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja formal, serta meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja yang rentan.

Permasalahan kemiskinan di tingkat daerah ini perlu mendapat perhatian khusus, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah, yang tingkat kemiskinannya masih sering berada di atas rata-rata nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Tingginya angka kemiskinan di wilayah ini tidak terlepas dari beban

demografis akibat besarnya jumlah penduduk yang belum sepenuhnya terserap secara optimal dalam aktivitas perekonomian. Penelitian oleh Sari *et al.*, (2023) turut menegaskan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dipengaruhi oleh integrasi beberapa faktor makroekonomi dan kependudukan, antara lain pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, serta capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah memerlukan rumusan kebijakan yang lebih terarah pada pengelolaan sumber daya manusia dan penguatan struktur ekonomi daerah.



Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015-2025 (Persen)

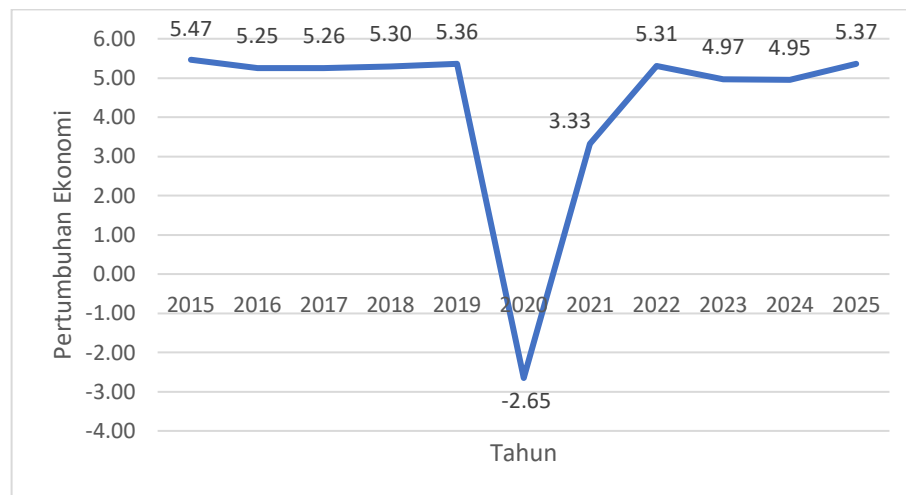
Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)*

Berdasarkan data pada grafik kemiskinan periode 2015-2025, Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menempati urutan kedua dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa setelah DI Yogyakarta. Meskipun persentase penduduk miskin berhasil diturunkan menjadi 9,48% pada tahun 2025, angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki karakteristik industri yang hampir sama, seperti Jawa Barat (7,02%) dan Banten (5,63%). Tingginya angka kemiskinan ini menunjukkan adanya tantangan

ekonomi di Jawa Tengah, di mana laju penurunan kemiskinan berjalan relatif lambat.

Tingginya persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan bahwa capaian indikator makroekonomi belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Permasalahan ini berkaitan erat dengan laju pertumbuhan ekonomi yang diduga belum inklusif, jumlah penduduk yang besar, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang fluktuatif, serta kondisi sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengingat variabel-variabel tersebut saling berkaitan, maka penanggulangan kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah memerlukan sinergi kebijakan dari pemerintah daerah, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan (Rizal & Purnairawan, 2024).

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat kemiskinan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui peningkatan PDRB diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan dapat menyebabkan manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan diiringi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia (Sholican *et al.*, 2023).

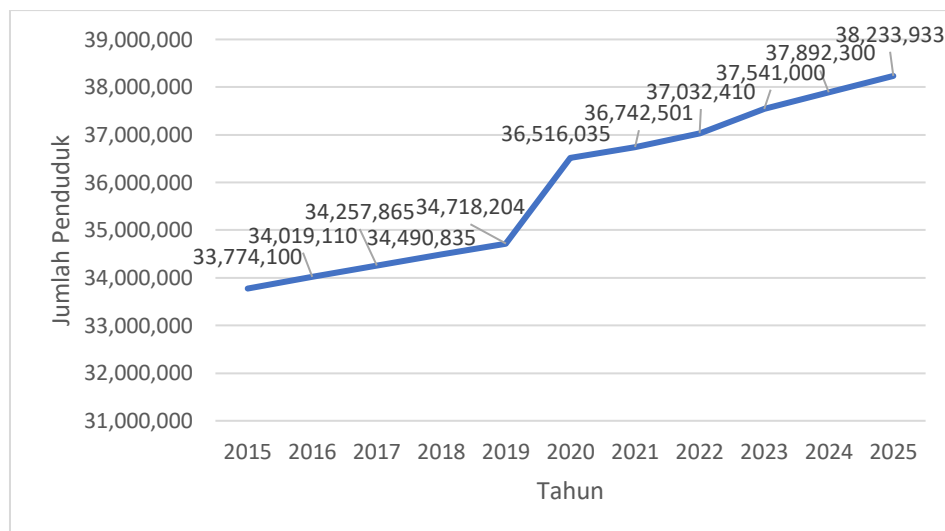


Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2025  
Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)*

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada periode 2015-2025 menunjukkan tren yang cukup stabil di angka 5%, namun sempat mengalami guncangan hebat dengan kontraksi sebesar -2,65% pada tahun 2020 akibat pandemi. Meskipun grafik menunjukkan pemulihan pasca-pandemi yang mencapai angka 5,37% pada proyeksi tahun 2025, angka kemiskinan di wilayah ini masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dinamika yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal daerah.

Pertumbuhan ekonomi berperan dalam menurunkan kemiskinan apabila disertai distribusi pembangunan yang merata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi turut berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan (Ardiani & Prabowo, 2024). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika kemiskinan daerah. Jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat dapat meningkatkan tekanan terhadap penyediaan lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar. Apabila peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan apabila tidak disertai peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja (Angelia & Anitasari, 2025).



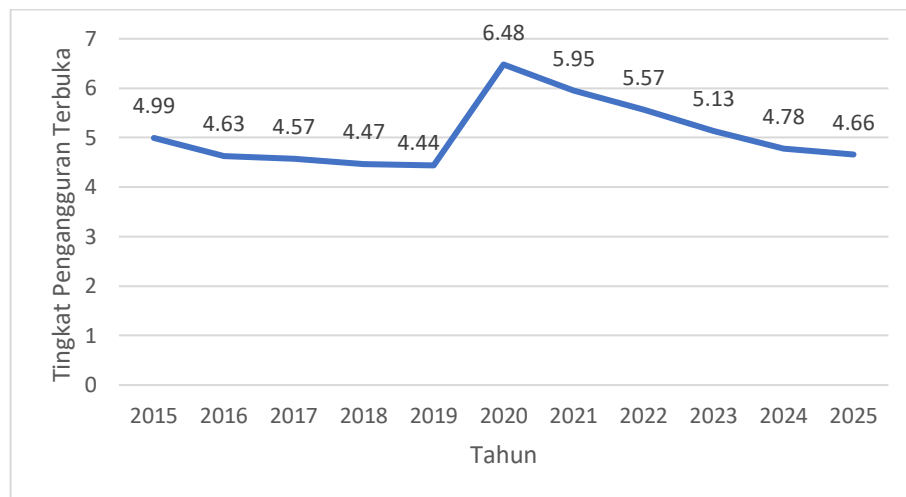
Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk pada Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)  
Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)*

Berdasarkan data jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2025, terlihat adanya peningkatan yang konsisten dari sekitar 33,77 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi 38,23 juta jiwa pada tahun 2025. Peningkatan yang cukup menonjol terjadi pada tahun 2020, kemudian jumlah penduduk terus bertambah secara bertahap hingga 2025. Pertumbuhan penduduk tersebut

berdampak pada meningkatnya kebutuhan lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk perlu diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta penciptaan kesempatan kerja yang memadai. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, kondisi ini berpotensi menambah tekanan sosial ekonomi dan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Jawa Tengah. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga mencerminkan adanya tekanan demografis dalam pembangunan daerah. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan perluasan peluang kerja dan peningkatan produktivitas masyarakat dapat meningkatkan kerentanan sosial ekonomi serta mendorong kenaikan tingkat kemiskinan (Shabilla Aisyah *et al.*, 2025).

Tingkat Pengangguran Terbuka berfungsi sebagai indikator utama untuk menilai situasi pasar tenaga kerja dan kesejahteraan di Jawa Tengah. TPT menggambarkan persentase angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan meskipun sedang aktif mencari pekerjaan, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Kurangnya penyerapan tenaga kerja yang optimal, terutama di sektor formal, menjadikan pengangguran sebagai masalah krusial dalam pembangunan daerah. TPT berdampak positif terhadap kemiskinan, yang berarti semakin tinggi angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan di daerah tertentu (Winata & Musthofa, 2024).



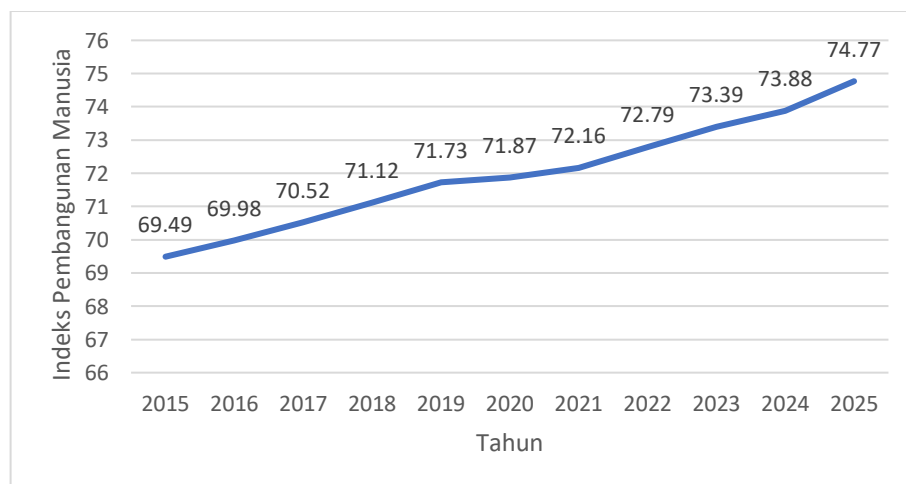
Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2025 (Persen)  
Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)*

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2025, terlihat bahwa TPT mengalami penurunan pada periode 2015-2019 dari 4,99 persen menjadi 4,44 persen. Namun, pada tahun 2020 TPT meningkat tajam hingga mencapai 6,48 persen, sebelum kembali menurun secara bertahap hingga 4,66 persen pada tahun 2025. Lonjakan pada tahun 2020 menunjukkan adanya tekanan besar terhadap pasar tenaga kerja yang berdampak pada menurunnya peluang kerja serta pendapatan masyarakat.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang tercatat tidak menganggur pascapandemi diduga kuat terserap ke dalam sektor informal atau pekerjaan rentan (*vulnerable employment*) yang menawarkan upah di bawah kelayakan hidup. Meskipun secara statistik status pengangguran terbuka menurun, terbatasnya lapangan kerja berkualitas membuat kelompok masyarakat ini tetap berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Peningkatan pengangguran maupun peralihan tenaga kerja ke sektor rentan ini cenderung berdampak pada terhambatnya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pengendalian angka pengangguran terbuka melalui penciptaan lapangan kerja

produktif menjadi bagian penting dalam kebijakan penurunan angka kemiskinan di daerah (Larasati *et al.*, 2024)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator gabungan yang dipakai untuk mengukur pencapaian pembangunan melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup yang memadai. IPM menggambarkan kompetensi SDM yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas serta peluang memperoleh pendapatan. Secara empiris, peningkatan IPM berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan karena perbaikan pada aspek pendidikan dan kesehatan memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat. IPM diyakini memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, menjadikannya sebagai komponen strategis dalam program pengentasan kemiskinan di suatu wilayah (Ferdiansa, 2022).



Gambar 1. 5 Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2025  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2025, terlihat bahwa IPM mengalami kenaikan yang stabil dari nilai 69,49 pada tahun 2015 hingga 74,77 di tahun 2025. Terjadinya peningkatan tersebut menunjukkan kemajuan yang berkelanjutan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Tren kenaikan yang stabil,

termasuk pada periode tekanan ekonomi tahun 2020, mengindikasikan bahwa kualitas pembangunan manusia di Jawa Tengah terus mengalami kemajuan.

Meskipun capaian IPM menunjukkan tren yang sangat positif, tingginya persentase kemiskinan di Jawa Tengah justru memunculkan tantangan tersendiri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut seharusnya diikuti oleh peningkatan produktivitas yang mampu mendorong percepatan pengentasan kemiskinan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan mungkin belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat miskin di lapisan terbawah. Walaupun demikian, intervensi kebijakan untuk mengakselerasi peningkatan IPM tetap terbukti memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa (Mannan & Arifin, 2025). Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi salah satu aspek strategis dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Pemilihan periode 2015-2025 penting karena mencakup tiga fase utama pembangunan daerah, yaitu sebelum pandemi (2015-2019), saat pandemi (2020-2021), dan pasca pandemi (2022-2025). Nazah *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Tengah yang sebelumnya menurun kembali meningkat selama dan setelah pandemi akibat gangguan ekonomi dan meningkatnya kerentanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi dan sosial berpotensi memengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi permasalahan pembangunan

yang kompleks dan dinamis, sehingga perlu dikaji secara komprehensif, terutama dalam konteks perubahan struktur ekonomi pascapandemi.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, TPT, dan IPM terhadap kemiskinan. Arwani *et al.*, (2023) menemukan IPM berpengaruh signifikan, sementara pertumbuhan ekonomi dan TPT tidak signifikan. Falah & Rahmawati (2024) menunjukkan seluruh variabel berpengaruh secara simultan, namun berbeda secara parsial antara jangka pendek dan panjang. Dahliah & Nirwana Nur, (2021) menemukan IPM dan GDP tidak signifikan secara parsial tetapi signifikan secara simultan, sedangkan Fathiyah *et al.*, (2024) menunjukkan jumlah penduduk signifikan, tetapi TPT tidak signifikan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap, sehingga menegaskan perlunya pengujian lebih lanjut mengenai faktor penentu utama kemiskinan.

Selain itu, sebagian besar literatur terdahulu masih terbatas pada analisis tingkat provinsi dalam rentang periode yang relatif singkat, sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap heterogenitas atau variasi karakteristik antarwilayah kabupaten/kota. Merespons celah penelitian tersebut, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada luasnya rentang periode pengamatan selama sebelas tahun (2015-2025) pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Observasi empiris yang secara spesifik melintasi tiga fase dinamika ekonomi ini diharapkan mampu meminimalisasi bias estimasi serta menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan representatif dalam mengurai penyebab kemiskinan daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, berikut adalah rumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi pada periode 2015-2025 berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah jumlah penduduk pada periode 2015-2025 berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2015-2025 berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada periode 2015-2025 berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2025.
2. Untuk menganalisis dan menguji hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015-2025.
3. Untuk menganalisis dan menguji hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2025.

4. Untuk menganalisis dan menguji hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2025.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini mampu memberi kontribusi bagi bidang ilmu ekonomi pembangunan, khususnya dalam analisis faktor-faktor penentu kemiskinan pada tingkat regional. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat temuan empiris mengenai korelasi antara pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, TPT, dan IPM dengan tingkat kemiskinan. Hasil temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi akademik untuk penelitian yang akan datang yang menyelidiki masalah kemiskinan dengan pendekatan kuantitatif.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini diproyeksikan bisa menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan guna mendukung pencapaian target pengentasan kemiskinan sesuai dengan dalam ketentuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk Provinsi Jawa Tengah. Hasil empiris mengenai dampak pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT), serta indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan dapat digunakan oleh Bappeda sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih terukur, berbasis data, dan selaras dengan prioritas daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkuat perumusan program pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dengan mempertimbangkan disparitas antar kabupaten/kota, sehingga kebijakan yang dirancang lebih adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan sesuai karakteristik masing-masing daerah.

### 1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada kajian dampak pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada periode 2015-2025 meliputi tiga fase dinamika. Data sekunder digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan bentuk data panel, yang terdiri dari data lintas sektoral dari 35 kabupaten/kota *cross section* dan data deret waktu dari tahun 2015-2025 *time series*. Pendekatan analisis yang digunakan adalah regresi data panel bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan.

Model regresi data panel dipilih karena kemampuannya untuk menangkap variasi antarwilayah dan dari waktu ke waktu secara bersamaan, sambil mengendalikan heterogenitas karakteristik masing-masing wilayah. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan PDRB pada harga konstan (ADHK), sedangkan kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk miskin. Penelitian ini tidak memasukkan variabel tambahan di luar model yang telah ditetapkan agar analisis tetap berfokus pada empat variabel independen utama yang telah ditetapkan.